

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia menerapkan 5 pilar dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu; PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standart), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAS (Standar Akuntansi Keuangan Syariah), SAKEMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah), dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Standar Akuntansi Keuangan untuk bidang usaha yang dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik adalah SAK EMKM, Purba (2019:2). Ikatan Akuntan Indonesia atau sering disebut sebagai IAI selaku organisasi profesi sekaligus badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) mulai menyusun Standar Akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Ditetapkannya Standar Akuntansi Keuangan adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang berlaku untuk umum. Tujuan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan yaitu untuk; keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan reliabel, memudahkan penyusunan laporan keuangan dikarenakan adanya pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusunan, memudahkan auditor dalam mengaudit, serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. (Syaiful Bahri 2020:18) 1 2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut sebagai UMKM merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi usaha rakyat yang dapat berdiri sendiri, berskala kecil, serta dapat dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga, yang jika dikembangkan maka akan memiliki potensi yang besar. (Ismadewi et al., 2017:2). Seperti yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan yang mampu memberikan pelayanan ekonomi secara meluas bagi masyarakat, dapat memperluas lapangan kerja serta dapat berperan aktif guna untuk mewujudkan stabilitas nasional, dan untuk tujuan UMKM itu sendiri yaitu, menumbuhkan serta mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan pengertian tersebut kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Adapun kriteria tersebut ialah: Tabel 1.1 Kriteria UMKM di Indonesia No Kategori Kriteria Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) Omset (dalam 1 tahun) 1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2 Usaha Kecil >50 Juta - 500 Juta >300 Juta - 2,5 Miliar 3 Usaha

Menengah >500 Juta - 10 Miliar >2,5 Miliar - 50 Miliar Sumber: UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM Berkembangnya perekonomian di Indonesia ditandai dengan banyaknya usaha yang telah berdiri diberbagai bidang, salah satunya ditandai dengan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut ASEAN Investment Report yang dirilis september 2022, Indonesia memiliki Usaha Mikro, 3 Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak di kawasan ASEAN. Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 65,46 juta unit. Pada 2021 UMKM di Indonesia tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Proporsi serapan tenaga kerja UMKM Indonesia itu merupakan yang paling besar di ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, UMKM di Indonesia menyerap tenaga kerja kisaran 35%-85%. Tetapi jika dilihat dari kinerjanya, Indonesia masih kalah dari Myanmar yang UMKM nya mampu menyumbang hingga 69,3% terhadap PDB. (www.katadata.co.id) Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Negara ASEAN (2021) No. Negara Jumlah UMKM (2021) 1 Indonesia 65,5 juta 2 Thailand 3,1 juta 3 Malaysia 1,2 juta 4 Filipina 996.700 ribu 5 Vietnam 651.100 ribu 6 Kamboja 512.900 ribu 7 Singapura 279.000 ribu 8 Laos 133.700 ribu 9 Myanmar 72.700 ribu Sumber: www.katadata.co.id Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan bahwa pada tahun 2022 total keseluruhan dari UMKM yang ada di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha. Pulau Jawa termasuk salah satu sektor terbesar, yaitu Jawa Barat dengan jumlah 1,49 juta unit usaha, Jawa Tengah mencapai 1,45 juta unit usaha, dan Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Diluar dari situ DKI Jakarta menjadi nomor empat terbesar yang mencapai 660 ribu unit dan Sumatera Utara berada di nomor urut lima dengan 596 ribu unit usaha. Sementara jumlah UMKM yang paling sedikit ada ditiga daerah yakni Papua Barat 4,6 ribu unit usaha, Maluku Utara 4,1 4 ribu unit usaha, dan Papua 3,9 ribu unit usaha. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2022) Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota diwilayah pesisir Provinsi Sumatera Utara. Kota Tanjung Balai merupakan kota yang telah berumur 402 tahun, kota tersebut berlokasi sebagai salah satu kota yang banyak di dominasi oleh pelaku usaha yang tergolong kedalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2022 terdata 7.271 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Tanjung Balai. Mayoritas bentuk usaha yang dimiliki adalah perseorangan dan untuk total aset yang dimiliki seluruh UMKM terdata berjumlah Rp111.676.913.000. Adapun persebaran jumlah UMKM berdasarkan kriteria Aset sebagai berikut: Tabel 1.3 Jumlah UMKM Berdasarkan Aset Kota Tanjung Balai (2022) NO Kategori Jumlah % 1 Mikro 6804 93,58% 2 Kecil 450 6,19% 3 Menengah 17 0,23% 4 Besar 0 0,00% TOTAL 7271 100% Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kota Tanjung Balai

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa UMKM di Indonesia semakin berkembang terkhusus didaerah kota Tanjung Balai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terkhusus kota Tanjung Balai. UMKM UD. Kios Mulana yang berlokasi diKota Tanjung Balai, merupakan salah satu jenis wirausaha mikro yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan perbaikan baik itu sepeda motor atau mobil, lebih dari itu usaha tersebut juga melakukan penjualan spare part guna untuk melengkapi kebutuhan penggantian 5 spare part kendaraan yang rusak. Pada bulan Maret 2023 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sitinjak selaku pemilik dan Ibu Fitriana selaku manajer keuangan usaha UD. Kios Mulana, menyampaikan bahwa permasalahan yang saat ini mereka hadapi adalah sulitnya mendapatkan dana tambahan terkait peningkatan usahanya, menjaga kualitas produk yang dihasilkan serta keberlangsungan usahanya. Dimana saat ini pelaku usaha mikro ingin mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil tetapi mereka tidak memiliki dana tambahan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga dapat memperlihatkan bahwa usaha mikro UD. Kios Mulana belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang telah diberlakukan untuk UMKM, hal ini dikarenakan masih minimnya informasi dan sosialisasi mengenai SAK EMKM pada pelaku UMKM. Kemudian pencatatan yang dilakukan juga masih tergolong sangat sederhana, dimana mereka hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran serta biaya-biaya yang dikeluarkan setiap harinya. Dalam mengatasi masalah tersebut saat ini pemerintah telah memberi solusi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009, tentang kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM baik untuk modal kerja maupun kredit investasi dapat dilakukan antara Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan melakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan program tersebut dapat memberikan injeksi modal dan pembiayaan terhadap UMKM yang ingin mendapatkan/mengajukan modal terkait usahanya. 6 Menyadari situasi dan kondisi tersebut, maka dari itu diperlukan yang namanya inovasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Standar Laporan Keuangan yang akurat akan membantu para pelaku usaha miko kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan bisnisnya, bukan hanya itu saja bahkan dapat mempermudah pihak Bank/Pemerintah dalam merespon dan menilai kelayakan UMKM untuk mendapatkan pinjaman Kredit Usaha. Oleh karena itu pentingnya Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Enitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) terhadap pelaku UMKM guna untuk mendapatkan akses modal tambahan yang lebih mudah kepada pihak Lembaga keuangan/KUR. Dari permasalahan

diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di Kota Tanjung Balai (Studi Kasus pada UMKM UD. Kios Mulana)”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan tugas akhir penulis sebagai berikut, yaitu: 1. Apakah Laporan Keuangan UMKM UD. Kios Mulana sudah sesuai dengan SAK EMKM? 2. Apa yang menjadi kendala UMKM UD. Kios Mulana dalam melakukan penerapan SAK EMKM pada saat melakukan penyusunan Laporan Keuangannya? 7

1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penulis ingin mengungkapkan tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui apakah proses pembukuan laporan keuangan yang dilakukan UMKM UD. Kios Mulana telah sesuai dengan SAK EMKM. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM pada UMKM UD Kios Maulana. 1.4 Batasan Penelitian Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, serta peneliti dapat memenuhi penelitiannya dengan baik juga sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya maka penulis membuat batasan masalah yang hanya berkaitan dengan: 1. Objek penelitian adalah UMKM UD. Kios Mulana. 2. Laporan Keuangan yang dibuat oleh UMKM tersebut. 3. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. 4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan UMKM UD. Kios Mulana. 8

1.5 Manfaat Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM UD. Kios Mulana, penulis mengharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 1.5.1 Secara Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refensi untuk penelitian selanjutnya terutama pada bidang akuntansi, dan penerapan SAK EMKM bagi pelaku UMKM dan penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu acuan praktek penerepan SAK EMKM untuk pelaku UMKM yang ingin meningkatkan usahanya dari usaha mikro menjadi usaha kecil. 1.5.2 Secara Praktis 1. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana untuk pembelajaran bagi peneliti agar terjun langsung kelapangan supaya mengetahui perbedaan antara teori yang sudah dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan, bukan hanya disitu penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta penerapan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan, dan juga sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana Akuntansi di Universitas HKBP Nommensen Medan. 9

2. Bagi Lembaga Pendidikan Penelitian ini daharapkan menjadi salah satu refrensi dalam kajian materi perkuliahan terkait dengan SAK EMKM dan pelaku UMKM. 3. Bagi Pembaca /Pelaku UMKM Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM pada pelaku

UMKM, sehingga pelaku dapat mengetahui bagaimana pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai dan pengaplikasiannya pada usaha mereka agar kedepannya mereka dapat mengembangkan bisnis tersebut lebih luas.

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat sebagai (DSAK IAI) menerbitkan standar akuntansi keuangan yang diberi nama SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang digunakan untuk usaha kecil dan menengah dalam membuat laporan keuangannya. Namun seiring dengan berkembangnya UMKM yang ada di Indonesia ternyata terdapat beberapa keterbatasan dari pelaku UMKM sehingga DSAK IAI membuat standar yang lebih sederhana yaitu SAK EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah).

10 Menurut IAI (2016) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan bentuk dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, atas dasar kesadaran tentang keberadaan entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang merupakan salah satu pondasi utama perekonomian, sehingga pengaturan dalam tatanan standar yang secara biaya tidak terlalu mahal dan secara manfaat diperlukan untuk membantu entitas tersebut berkembang dimulai dengan kesadaran mengenai pemahaman pentingnya penyusunan laporan keuangan. SAK EMKM mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas mikro, kecil, dan menengah maka standar yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah diperuntukkan bagi entitas yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM sendiri berguna untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan, bukan hanya itu saja bahkan SAK EMKM juga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya.

12 2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Menurut IAI (2018) Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan informasi

tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan Keuangan juga dapat didefinisikan sebagai laporan yang pada umumnya terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas, dimana neraca tersebut menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada periode tertentu sedangkan laba rugi menunjukkan hasil dan beban perusahaan yang telah dicapai. Menurut Azizah Rachmanti et al., (2019:4) Laporan Keuangan adalah: “Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti; pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen”. Menurut Darminto, (2019:19) Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Menurut Kasmir (2019:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mem pertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Pengguna laporan keuangan dibedakan atas pihak internal dan pihak eksternal. Yang mana pihak internal adalah manajemen, pemilik, dan pegawai perusahaan sedangkan, untuk pihak eksternal adalah pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. 13 Sedangkan menurut SAK EMKM (2016) Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Maka dapat disimpulkan Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada Laporan Keuangan, SAK EMKM membuat laporan keuangan yang lebih sederhana dari laporan keuangan umum atau SAK ETAP, dimana SAK EMKM hanya menggunakan minimum 3 jenis laporan keuangan saja yaitu: 1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode Yaitu Laporan Keuangan yang menyajikan tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK EMKM sendiri tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya, meskipun demikian untuk penyajian pos-pos aset entitas dapat mengurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Contoh Format Laporan Keuanag dapat dilihat pada tabel 2.1 2. Laporan Laba Rugi Selama Periode Yaitu Laporan Keuangan yang menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporannya. Menurut SAK EMKM 2016 (5.1:11), laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Pos-pos

yang mencakup antara lain yaitu pendapatan, beban 14 keuangan, dan beban pajak. Contoh Format Laporan Laba Rugi dapat dilihat pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Format Laporan Posisi Keuangan ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2022 ASET Catatan 2022 2021 Kas dan setara kas Kas 3 xxx xxx Giro 4 xxx xxx Deposito 5 xxx xxx Jumlah kas dan setara kas xxx xxx Piutang Usaha 6 xxx xxx Persediaan xxx xxx Beban dibayar dimuka 7 xxx xxx Aset tetap xxx xxx Akumulasi penyusutan (xx) (xx) JUMLAH ASET xxx xxx LIABILITAS Utang usaha xxx xxx Utang Bank 8 xxx xxx JUMLAH LIABILITAS xxx xxx EKUITAS Modal xxx xxx Saldo laba (defisit) 9 xxx xxx JUMLAH EKUITAS xxx xxx JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS xxx xxx Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2016) 15 Tabel 2.2 Format Laporan Laba Rugi ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 PENDAPATAN Catatan 2022 2021 Pendapatan usaha 10 xxx xxx Pendapatan lain-lain xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx BEBAN Beban usaha xxx xxx Beban lain-lain 11 xxx xxx JUMLAH BEBAN xxx xxx LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN xxx xxx Beban pajak penghasilan 12 xxx xxx LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN xxx xxx Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2016) 3. Catatan atas Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM 2016 (6.1:14), Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan serta rincian pos-pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Untuk jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas tersebut, dan untuk setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. 16 2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2018:2) “Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, yang termasuk dalam pengguna meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor.” Menurut Rudianto didalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Adaptasi IFRS terdapat 6 tujuan pembuatan dan penyajian laporan keuangan oleh sebuah entitas sebagai berikut: 1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. 2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba. 3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam

menghasilkan laba dimasa depan. 4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkkan laba 17 5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi. 6. Memberikan mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui kinerja atau gambaran pada suatu perusahaan diaman informasi yang terdapat didalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor, pemerintah, mauoun manajemen perusahaan.

### 2.2.2. Pengakuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Menurut SAK EMKM 2016 (2.12:4),

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai manfaat ekonomi yang terkait dengan pos-pos kedalam atau keluar dari entitas. Untuk dasar bukti dapat dilihat dari kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan, dan akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. 18 Pengakuan-pengakuan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah sebagai berikut:

1. Aset Menurut SAK EMKM 2016 (2.22:6), Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya dimasa depan dapat dipastikan akan mengalir kedalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
2. Liabilitas Menurut SAK EMKM 2016 (2.23:6), Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
3. Penghasilan Menurut SAK EMKM 2016 (2.24.:6), Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- 19 4. Beban Menurut SAK EMKM 2016 (2.2.5:7), Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur scara andal.
5. Saling Hapus Menurut SAK EMKM 2016 (2.26:7) Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dna eban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh ED



SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangi hasil penjualan aset tetap dari jumlah aset tetap dan beban penjualan terkait. Dalam SAK EMKM 2016 (4.2:11) Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: 1. Kas dan setara kas 2. Piutang 3. Persediaan 4. Aset tetap 5. Utang usaha 6. Utang bank 7. Ekuitas

### 2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dapat dijalankan oleh seseorang baik individu, rumah tangga, maupun badan usaha dengan catatan kekayaan dan omset yang tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahunnya. Dengan kata lain, pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha yang menjalankannya juga masih tergolong kecil. Jenis-jenis UMKM juga dapat berupa usaha kuliner, fashion, agronisnis, warung makan bahkan kerajinan tangan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia sehingga, Pemerintah Indonesia baik dalam membantu UMKM berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan keuangan melalui Bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM pada akhir tahun 2018 sebesar 20% (Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, UMKM perlu menyiapkan laporan keuangannya berdasarkan jenis usaha yang akan dilakukan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sementara Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan menurut Bank Indonesia UMKM adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Bab I pasal 1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi

kriteria usaha kecil. 2.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah terdiri atas 3 kelompok besar usaha yaitu Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun kriteria UMKM yang diatur berdasarkan omset dan tiap skala usaha adalah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro Usaha Mikro adalah bisnis yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 2. Usaha Kecil Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki orang perorangan, dan merupakan badan usaha yang bukan perusahaan cabang yang dimiliki dan dikuasai secara langsung maupun tidak langsung serta memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Usaha Menengah Usaha Menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh orang perorangan, maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki/ dikuasai yang menjadi bagian baik secara langsung dan tidak langsung dalam skala besar maupun kecil serta memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

23 2.3.2 Klasifikasi Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang pengklasifikasian UMKM baik berdasarkan perkembangan usaha, tenaga kerja, dan karakteristik umumnya ialah sebagai berikut: Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengklasifikasian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha yaitu, jika Usaha Kecil untuk tenaga kerja 5-19 orang, dan untuk Usaha Menengah tenaga kerja 20-99 orang. Sedangkan menurut perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: 1. UMKM sektor Informal seperti pedagang kaki lima 2. UMKM Mikro, UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan dan mengembangkan usahanya. 3. UMKM kecil dinamis, UMKM yang sudah mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 4. Fast Moving Enterprise, UMKM yang sudah berwirausaha dengan baik dan telah siap beralih menjadi

usaha besar. Karakteristik Umum tiap skala usaha dapat dilihat dalam Tabel 2.3 24 Tabel 2.3 Karakteristik Umum Skala Usaha UMKM Skala Usaha Karakteristik Usaha Mikro 1. Jenis barang/komoditi tidak tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usaha tidak tetap/ sewaktu-waktu dapat berpindah tempat usaha. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan dana pribadi dengan dana usaha. 5. Belum memiliki akses kepada perbankan, namun sebagian sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank (LKNB). 6. Belum memiliki izin usaha / NPWP. 7. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. Contoh: pedagang kaki lima, pedagang di pasar. Usaha Kecil 1. Jenis barang/komoditi umumnya sudah tetap/ tidak gampang berubah. 2. Tempat usaha umumnya sudah menetap/tidak berpindahpindah. 3. Sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sangat sederhana, misalnya neraca usaha. 4. Sudah mulai melakukan pemisahan antara dana pribadi dengan dana usaha. 5. Sebagian besar sudah akses ke perbankan maupun LKNB dalam keperluan modal. 6. Pengusaha atau pekerja memiliki pengalaman dalam berwira usaha. 7. Sudah memiliki NPWP Contoh: pedaganag di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya Usaha Menengah 1. Tempat Usaha sudah menetap. 2. Memiliki SDM yang berpendidikan dan sudah terlatih. 3. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan maupun LKNB. 4. Memiliki NPWP perusahaan. 5. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 6. Memiliki manaejemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. Sumber: [www.smartlegal.id](http://www.smartlegal.id) 25

2.4 Penelitian Terdahulu Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan refrensi. Berikut merupakan analisis terhadap penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulislakukan. Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu NO Nama/ Tahun

Penelitian Judul Penelitian Metode Hasil 1 Sulistia Analisis Metode Hasil penelitian Suwondo Penerapan kualitatif menunjukkan bahwa (2021) Penyusunan dengan penyusunan laporan Laporan pendekatan keuangan yang Keuangan deskriptif dilakukan belum UMKM sepenuhnya Berdasarkan menerapkan SAK SAK EMKM EMKM, hal ini (Studi Kasus dikarenakan pada UMKM terbatasnya CV. NELL' Q pemahaman UMKM Persada terkait SAK EMKM. Mandiri) 2 Ade Penerapan Metode Hasil penelitian Nahdiatul Laporan wawancara menyimpulkan bahwa Hasanah, Tri Keuangan kepada pelaku para pelaku umkm Wahyuni Berbasis SAK usaha serta penjual rempeyek Sukiyaningsih EMKM pada dokumentasi. bayam tidak memiliki (2021) UMKM laporan keuangan. Rempeyek Dalam keseharian Bayam menjalankan usaha, Kecamatan karyawan hanya Cikeusal melakukan pencatatan atas transaksi

pemasukan saja 3 Baiq Penerapan Penelitian Hasil penelitian Widiastiawati, Penyusunan kualitatif dan menunjukkan bahwa Denni Laporan pendekatan UMKM UD Sari Hambali Keuangan diskriptif. Bunga belum (2020) Berdasarkan menerapkan SAK Standar EMKM, peneliti Akuntansi melakukan penyusunan Keuangan 26 Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Sari Bunga laporan keuangan di UMKM UD Sari 4 Mortigor Analisis Jenis Berdasarkan hasil Afrizal Purba Penerapan SAK penelitian penelitian dapat (2019) EMKM Pada yang disimpulkan bahwa, penyusunan digunakan (1) Pembukuan Laporan deskriptif dilaksanakan pada Keuangan kualitatif UMKM masih sebatas UMKM di Kota adalah desain laporan usaha yang Batam penelitian disusun tidak sesuai yang dengan keuangan digunakan standar akuntansi, dalam tetapi entitas penelitian ini, menganggapnya yakni berupa sebagai laporan studi kasus. keuangan. (2) Entitas belum melakukan prosedur akuntansi dalam akuntansi. (3) UMKM belum menerapkan SAKEMKM. (4) Entitas belum dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM prasarana yang tidak memadai serta pemilik usaha yang kurang fokus pada pelaporan hasil usahanya 5 Moudy Analisis Metode yang Hasil penelitian Olyvia Uno, Penerapan digunakan menunjukkan bahwa Lintje Standar kualitatif pencatatan di Rumah Kalangi, Akuntansi dengan Karawo masih sangat Rudy J. Keuangan pendekatan sederhana, hanya Pusung Entitas Mikro, deskriptif meliputi pencatatan (2019) Kecil, dan atas penjualan produk. Menengah (SAK Selain itu, Rumah 27 UMKM UD Kios MULANA Menerapkan Tidak Menerapkan Pembukuan Sesuai SAK Tidak sesuai SAK Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM: 1. Laporan Laba/Rugi 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Catatan Atas Laporan Alasan Alasan Hambatan Hambatan EMKM) Pada Karawo juga belum Usaha Mikro, menyusun laporan Kecil, dan keuangan berdasarkan Menengah SAK EMKM yang (UMKM) Studi berlaku dikarenakan Kasus pada minimnya pemahaman Rumah Karawo akan penyusunan di Kota laporan keuangan Gorontalo sesuai standar. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sudah sepatutnya dilakukan, mengingat laporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan dari suatu badan usaha. Sumber: Diolah Peneliti 2.5 Kerangka Berpikir Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, maka secara sistematis dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut: Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Sumber: Diolah Peneliti 28 Penjelasan tentang model kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut, yang pertama peneliti melakukan pemilihan terhadap UMKM seperti apa yang ingin dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah ditentukan akan melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM UD. Kios Mulana, selanjutnya penulis mencari tahu tentang pengetahuan dan pengalaman akuntansi yang diketahui oleh pelaku UMKM dtersebut, lalu peneliti mencari tahu apakah pelaku UMKM tersebut telah menerapkan akuntansi dan pembukuan

atau belum, dan apabila UMKM tersebut telah membuat laporan keuangan, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum. Jika belum menerapkan sesuai dengan SAK EMKM akan dianalisis apa penyebab sehingga tidak melakukan pembukuan sesuai dengan standar. Setelah dievaluasi mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), selanjutnya dianalisis kendala/hambatan apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kota Tanjung Balai.

### BAB III METODE PENELITIAN 3.1

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2019:18) Analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik, dan terkait dengan rumusan masalah seperti hasil observasi dan wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan triangulasi.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada UD. Kios Mulana yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Sijambi, Kecamatan. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21368

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah berupa data internal, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan tersebut yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 3.1 Data Primer

Sugiyono (2019:193) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam usaha tersebut, seperti penanggungjawab keuangan, pemilik usaha, dan bagian-bagian yang bersangkutan dengan pengolahan data keuangan usaha tersebut, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu kepada pemilik atau narasumber, sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu penerapan standar akuntansi.

#### 3.2 Data Sekunder

Sugiyono (2019:193) Data sekunder adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat atau yang sudah ada di perusahaan baik dalam bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan yang terjadi dalam setiap kegiatan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangannya, seperti bukti transaksi penjualan, bukti transaksi pembelian, laporan kas keluar masuk, catatan perhitungan, biaya overhead pabrik, rekening koran perusahaan dan piutang usaha

perusahaan serta laporan lainnya yang mendukung pembuatan laporan keuangan tersebut.

31 3.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang objektif agar lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Wawancara Untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari pelaku UMKM diperlukan teknik wawancara (interview). Tujuan dari melakukan wawancara adalah agar penulis dapat menggali lebih dalam tentang sudut pandangan subjek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara langsung secara terstruktur sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun, teknik ini dilakukan secara tatap muka melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dirangkum oleh peneliti terkait dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan oleh narasumber atau informan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi Dokumentasi yaitu berupa cara pengumpulan data peristiwa atau yang sudah berlalu seperti berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen yang dimaksud seperti sejarah UMKM, catatan harian penjualan, serta yang lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik dokumentasi berorientasi 32 agar mendapatkan data melalui dokumen - dokumen dan catatan yang tertulis berupa arsip pada UD. Kios Mulana.

3.5 Teknik Keabsahan Data 3.5.1 Uji Kredibilitas Uji kredibilitas terbagi menjadi 6 macam cara dalam penelitian yaitu;

1. Perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan dilakukan agar dapat menghapus jarak antara peneliti dengan narasumbernya sehingga tidak akan ada informasi yang disembunyikan lagi oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.
2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan suatu wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan agar meningkatkan kredibilitas dari data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang sedang diamati.
3. Triangulasi Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada suatu titik tengah informasi dari data yang terkumpul agar dapat dilakukan pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada sebelumnya.

33 4. Analisis Kasus Negatif Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti sedang mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan tersebut, berarti data tersebut sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan penelitian akan lebih kredibel.

5. Menggunakan bahan referensi Bahan referensi

merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud tersebut dapat berupa kamera, handycam, alat perekam suara dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Bahan referensi tersebut sangat mendukung kredibilitas data. 6. Mengadakan member check

Member check merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini bertujuan agar mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut data valid.

Pelaksanaan member check dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah menemukan suatu temuan, atau kesimpulan.

34 3.6 Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif.

Dalam menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek dengan apa adanya. Hasil dari laporan menggambarkan keadaan obyek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan kata lain penelitian deskriptif menggambarkan dengan sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti dan harus secara tepat. Data didalam penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur dan dilakukan dengan santai mungkin, dengan tujuan agar menggali lebih banyak dan lebih dalam informasi dari informan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh data yang lebih akurat dan agar memudahkan proses analisis data. Beberapa langkah yang dilakukan penulis dalam memperoleh data penelitian adalah sebagai berikut: 1. Melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber UMKM UD. Kios Mulana untuk pengumpulan data. 2.

Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi pada UMKM tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. 35

3. Menyajikan data yang telah disusun kedalam tabel agar mudah dipahami, serta memudahkan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. 4.

Menarik kesimpulan dan memberikan saran perbaikan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM